

ABSTRAK

Rd. Sugara Mochamad Haddad. (1001599). MODEL KEPEMIMPINAN POLITIK SUNDA DALAM KONTEKS PENDIDIKAN POLITIK (Studi Kasus Bupati Purwakarta)

Kepemimpinan dalam masyarakat terdapat dari kepemimpinan formal seperti pemerintah maupun organisasi dan lembaga politik. Kepemimpinan non formal seperti tokoh beradab, tokoh budaya atau tokoh adat. Kepemimpinan non formal dalam masyarakat Sunda diperoleh dari masyarakat yang bisa bersumber dari integritas sang pemimpin, keahlian, penghargaan, atau hubungan. Sedangkan pemimpin formal diperoleh melalui mekanisme pemilihan yang diselenggarakan setiap lima tahun. Masyarakat Jawa Barat memilih gubernur, walikota atau bupati dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun. Sebagian besar masyarakat di Jawa Barat adalah Masyarakat Sunda. Tipologi suku yang menempatkan laki-laki dalam kepemimpinan lebih menonjol. Salah satu daerah yang kental dengan nilai-nilai Sunda adalah Purwakarta. Sistem sosial masyarakat maupun pola interaksi dalam kehidupan bermasyarakat kental dengan nilai Sunda seperti Orang Sunda dikenal memiliki sifat optimis, ramah, sopan, dan riang. Dalam Masyarakat Sunda kepemimpinan tidak hanya bersumber dari proses resmi sebuah demokrasi dalam memilih pemimpin. Pemimpin yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat Sunda adalah para pemimpin yang dipilih oleh rakyat dengan menampilkannya nilai-nilai “kasundaan” yang bersumber dari filosofi masyarakat Sunda. Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian adalah 1) Bagaimana sikap kepemimpinan politik Sunda dalam konteks pendidikan politik? 2) Bagaimana kredibilitas kepemimpinan politik Sunda dalam konteks pendidikan politik? 3) Bagaimana konsistensi kepemimpinan politik Sunda dalam konteks pendidikan politik? 4) Bagaimana visi dan misi serta tujuan kepemimpinan politik Sunda dalam konteks pendidikan politik? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metode kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data untuk mendukung kelancaran penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa, kepemimpinan politik orang Sunda dalam konteks pendidikan politik adalah kepemimpinan yang memunculkan nilai-nilai kesundaan dalam gaya kepemimpinannya sebagai bagian dari pendidikan politik dalam arti luas. Nilai-nilai kesundaan yang dimunculkan secara tidak langsung merupakan bagian dari cara untuk melestarikan dan menjaga budaya leluhur orang Sunda yang hampir dilupakan oleh masyarakat Purwakarta. Dalam hal gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi menggunakan gaya kepemimpinan *transending totaliter* dalam memimpin Kabupaten Purwakarta. Gaya *transending totaliter* adalah gaya kepemimpinan yang tidak terlalu mengutamakan dialog dalam merumuskan suatu kebijakan atau pun keputusan yang dilakukan, namun secara tidak langsung masyarakat akan menemukan filosofi dan makna dalam setiap kebijakan yang telah dilakukan oleh Bupati Purwakarta terutama nilai-nilai kesundaan yang terdapat didalamnya. Untuk mendorong keberhasilan pendidikan politik maka pendidikan politik perlu diformalkan terutama pada kelompok pemilih pemula. Sedangkan upaya untuk mendorong kesadaran mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara yang harus mengimplementasikan filosofi yang

Rd. Sugara Mochamad Haddad, 2014

MODEL KEPEMIMPINAN POLITIK SUNDA DALAM KONTEKS PENDIDIKAN POLITIK
(STUDI KASUS BUPATI PURWAKARTA)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bersumber pada budaya bangsa dilakukan secara non formal baik melalui program budaya maupun peristiwa budaya.

Rd. Sugara Mochamad Haddad, 2014

*MODEL KEPEMIMPINAN POLITIK SUNDA DALAM KONTEKS PENDIDIKAN POLITIK
(STUDI KASUS BUPATI PURWAKARTA)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu